













Sedangkan menurut ulama kontemporer dalam menanggapi hal tersebut, seperti Pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, Para fukaha mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para fukaha mutaakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Alquran dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan baitulmal. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyaikan Alquran dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena pekerjaan ibadah.

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upah atas ketaatan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan. Oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Alquran dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca Alquran karena itu bukanlah sesuatu yang darurat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari baitulmal dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.

Jadi ketentuan yang ditetapkan oleh takmir masjid Nurul Muttaqin untuk pemberian imbalan (upah) kepada pencari dana diperbolehkan dan

tidak ada larangan karena dilihat dari segi manfaat dan kegunaanya bagi masjid Nurul Muttaqin Perumdam Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini. Adanya perjanjian diawal juga memperjelas bahwasanya tidak ada kecacatan pada akadnya. Tidak berlawanan dengan prinsip ijarah (*ujrah*) khususnya upah dalam pekerjaan ibadah dan termasuk *ujrah al-mithli* upah yang sepadan.

